# Audit Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan: Pendekatan Literatur

**Theresia Woro Damayanti**
Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana
Email: woro@uksw.edu

## ABSTRAK

Akuntansi pertanggungjawaban sosial yang merupakan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan membutuhkan audit oleh pihak-pihak yang independen karena ternyata stakeholder memberikan respon yang positif atas laporan dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial. Tetapi, kenyataannya belum ada standar yang mengatur tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial yang menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan audit atas akuntansi pertanggungjawaban sosial. Berdasarkan praktek-praktek industri, pertanggungjawaban sosial dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu menjelaskan tujuan, mengidentifikasikan stakeholder dalam kepentingannya, memperhatikan kepentingan stakeholder dan melihatnya sebagai pusat audit pertanggungjawaban sosial, melakukan verifikasi dari pihak internal dan eksternal yang independent, mengungkapkan penilaian kinerja kepada stakeholder dan publik, menilai kembali tujuan dan aktivitas perusahaan.

**Kata kunci:** Akuntansi pertanggungjawaban sosial, audit pertanggungjawaban sosial.

## ABSTRACT

*Accounting social responsibilities that voluntary disclosurein financial statement need to verify from independent board because stakeholder give a positive response of it. Bu tthere is no standard in accounting social responsibilities. This situation makes difficulty in audit of accounting socialresponsibilities.Based on industrial practice, social responsibilities auditcan do with this process: define objective, identification of stakeholder interest, taking stakeholders interests and views as the core of social audit, verification either internally or external independently, disclosing of performance assessments to the stakeholders and the public, setting up the goals or actions for thenext reporting year.*

***Keywords**: Social responsibility accounting, social responsibilities audit.*

## PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perusahaan dan industri telah banyak mengakibatkan munculnya persoalan perusahaan yang tidak hanya berkaitan dengan *shareholders* tetapi juga dengan *stakeholder*. Hal ini terjadi karena tujuan perusahaan semakin berkembang tidak hanya mencapai profit yang tinggi tetapi juga mengembangkan keberadaan usahanya secara keseluruhan. Usaha untuk mengembangkan keberadaan perusahaan tidak lepas dari hubungannya dengan *stakeholder* misalnya tenaga kerja, masyarakat, pemerintah dan konsumen. Hubungan antara perusahaan dan stakeholder ini biasa disebut sebagai tanggung jawab (*responsibilities*).

Tanggung jawab antara perusahaan dan *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab perusahaan ke *stakeholder* dan tanggung jawab *stakeholder* ke perusahaan. Clarkson dan Deck (1992) menggambarkan dua tanggungjawab antara perusahaan dan *stakeholder* seperti Gambar 1

Gambar 1 menunjukkan bahwa *stakeholder* memiliki tanggungjawab kepada perusahaan dan sebaliknya perusahaan memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan keberadaan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* disebut sebagai tanggung jawab sosial.

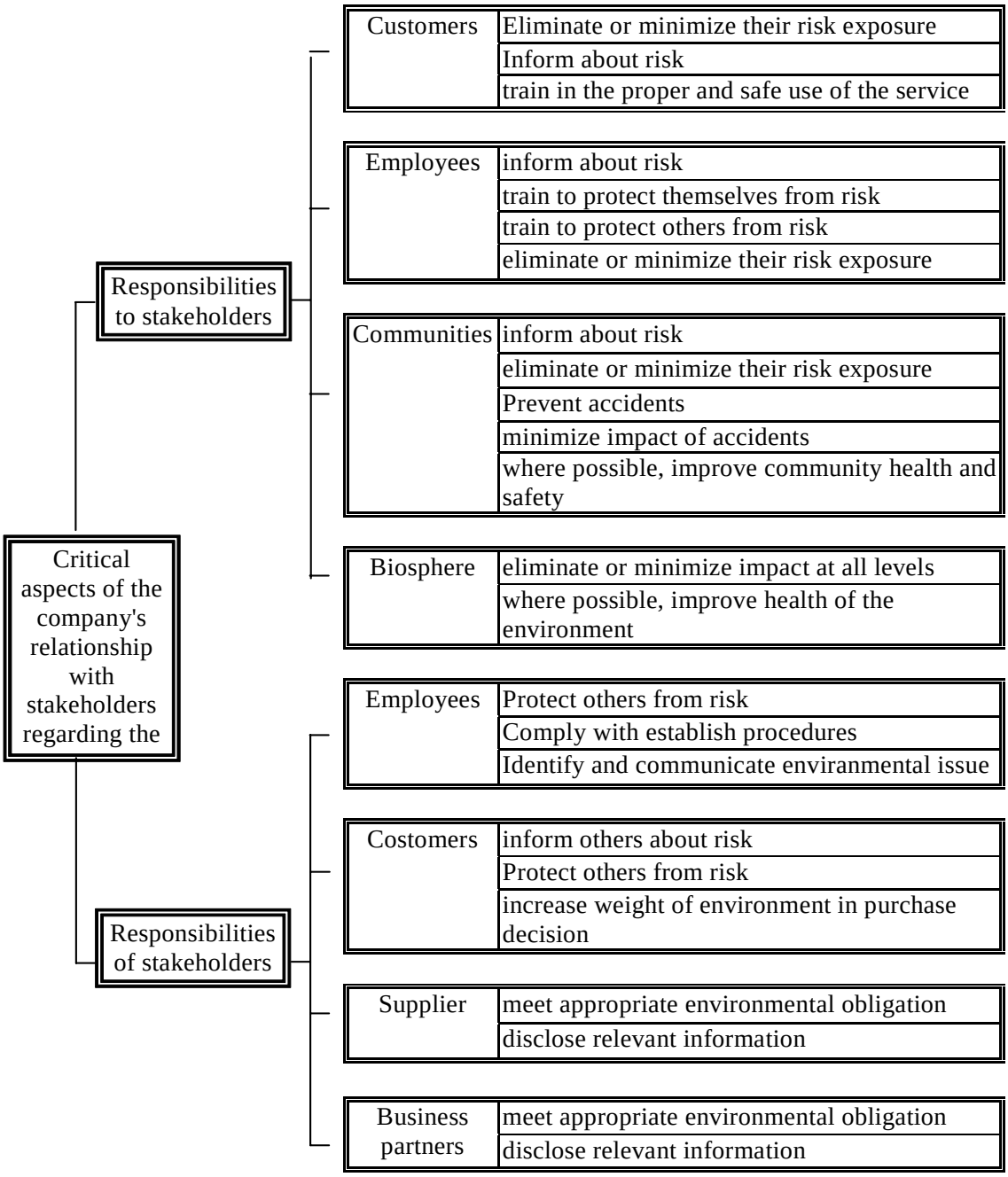


Sumber: Clarkson dan Deck (1992)

**Gambar 1. Tanggung Jawab Perusahaan dan *Stakeholder*.**

Berkembangnya dunia usaha semakin menuntut perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Akuntansi merespon kebutuhan masyarakat atas pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat dengan menganjurkan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Laporan atas tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* ini disebut sebagai laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial (*Social Responsibility Accounting*). Untuk menjamin bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan mencerminkan hal yang sesungguhnya maka diperlukan audit atas laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang disebut sebagai audit pertanggungjawaban sosial (*Socials Responsibility Auditing*).

Masalah yang terjadi adalah akuntansi pertanggungjawaban sosial sampai saat ini masih merupakan *voluntary disclosure* sehingga belum ada standar yang mengatur bagaimana seharusnya akuntansi pertanggungjawaban sosial diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini menyebabkan sulitnya proses dalam audit pertanggungjawaban sosial.

## AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

Akuntansi pertanggungjawaban sosial yang timbul dari hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* telah muncul pada tahun 1970an. Seiring dengan perkembangan akuntansi pertanggungjawaban sosial, muncul beberapa definisi para ahli tentang akuntansi pertanggung jawaban sosial yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Beberapa Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial**

| PENDIFISI | DEFISI |
|---|---|
| Mathew (1993) | Pengungkapan sukarela dari informasi baik kualitatif maupun kuantitaif yang dibuat perusahaan untuk menginformasikan atau mempengaruhi pembaca. Pengungkapan kuantitafif bisa bersifat finansial maupun non finansial. |
| UEC (1983) | Garis besar dari aspek yang paling signifikan atas kinerja sosial perusahaan selama satu tahun. |
| The Corporate Report (ASSC,1975) | Laporan biaya dan manfaat yang dapat dan tidak dapat dinyatakan secara moneter, yang berasal dari aktivitas ekonomi dan berasal dari masyarakat |

Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Dari beberapa difinisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi pertanggung jawaban sosial merupakan laporan atas aktivitas perusahaan dalam hubungannya dengan *stakeholder*. Misalnya beasiswa yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat, penanaman pohon yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan atau mengikutsertakan karyawan dalam pendidikan dan pelatihan yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada karyawan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial memuat berbagai aspek yang menggambarkan keadaan perusahaan dalam hubungannya dengan *stakeholder*. Berikut ini beberapa aspek yang dipandang perlu dalam akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut beberapa ahli.

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara garis besar aspek dalam akuntansi pertanngungjawaban sosial terdiri dari lingkungan, tenaga kerja dan masyarakat disekitar perusahaan. Dari aspek-aspek diatas dapat dibedakan antara yang dapat diukur secara moneter dan yang tidak dapat diukur secara moneter. Beberapa aspek akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dapat diukur secara sosial juga terdapat dalam akuntansi konvensional.

**Tabel 2. Aspek dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial**

| Pendifisi | Aspek Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial |
|---|---|
| Jackman, 1982 | Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, tenaga kerja dan pelatihan, hak masyarakat, kesempatan yang sama bagi masyarakat, pembaharuan dan perkembangan, polusi, konservasi, budaya, pemeliharaan kesehatan |
| UEC (1983) | Level tenaga kerja, kondisi pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, hubungan industi, gaji dan kenikmatan lain dari tenaga kerja, distribusi dari nilai tambah, dampak pada lingkungan |
| Gray, Owen dan Maunders (1987) | Jumlah tenaga kerja, gaji dan kenikmatan, kondisi kesehatan dan keselamatan, pendidikan dan pelatihan, relasi industri. |

Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Di Indonesia sendiri perkembangan akuntansi pertanggungjawaban sosial dimulai sejak tahun 1994. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berusaha untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik yang mencoba mengadopsi masalah-masalah sosial dalam perusahaan. Termasuk Undang-undang Pajak Penghasilan yang telah dirubah pada tahun 1994, yang memperbolehkan biaya pengolahan limbah sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga perusahaan yang menghasilkan limbah akan mentaati peraturan tentang pengolahan limbah, karena biaya yang dikeluarkan nantinya dapat dikurangkan penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya dapat mengurani besarnya pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat digunakan perusahaan untuk membantu perusahaan dalam membuktikan klaim atas tanggung jawab sosial mereka, memonitor kinerja mereka yang berhubungan dengan perubahan nilai sosial, mengkomunikasikan informasi yang dapat dipercaya dan merespon umpan balik dari *stakeholder*. Hal ini juga memperkuat dasar perusahaan dalam jangka waktu panjang dengan menyediakan perusahaan informasi yang penting tentang apa yang terjadi pada lingkungan eksternal, mengembangkan relasi dengan komunitas, pekerja dan pemasok serta konsumen.

Sampai saat ini, pelaporan atas akuntansi pertanggungjawaban sosial masih bersifat *voluntary disclosure* (pengungkapan suka rela) sehingga perusahaan tidak wajib untuk melaporkan akuntansi pertanggungjawaban sosial-

nya. Tetapi karena sifat akuntansi pertanggungjawaban sosial ini sangat penting (sama pentingnya dengan laporan atas keuangan perusahaan), maka sebaiknya perusahaan melaporkan pertanggungjawaban sosialnya karena pengungkapan atas tanggung jawab sosial akan membentuk suatu kepercayaan *stakeholder* dan hal ini akan menambah nilai bagi perusahaan. Beberapa penelitian yang menunjukkan pentingnya pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 3. Aspek dan Ukuran dalam Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial**

| Aspek | Sub-aspek | Moneter | Non Moneter |
|---|---|---|---|
| Lingkungan | Pembaharuan polusi | ✓ | ✓ |
| | Konservasi alam | ✓ | ✓ |
| | Dampak lingkungan | | ✓ |
| Tenaga Kerja | Pendidikan dan pelatihan | ✓ | ✓ |
| | Kesehatan dan keselamatan | ✓ | ✓ |
| | Level tenaga kerja | | ✓ |
| | Usia tenaga kerja | | ✓ |
| | Gaji dan kenikmatan | ✓ | ✓ |
| | Jumlah tenaga kerja | | ✓ |
| Masyarakat | Hak masyarakat | | ✓ |
| | Kesempatan dalam industri | | ✓ |
| | Hubungan | | ✓ |

**Tabel 4. Penelitian tentang Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial**

| Peneliti | Sampel | Indikator Sosial | Indikator Keuangan | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| Belkaouli (1976) | 50 perusahaan Amerika | Pengungkapan beban pengendali polusi | Harga penutupan bulanan | Efek positif yang substansial tapi temporer dari harga saham terhadap pengungkapan polusi |
| Spincer (1978) | 18 perusahaan industri kertas | Pengembangan pengendali polusi | Profitabilitas, ukuran, total resiko, resiko sistematis, PER | Perusahaan dengan pengendali polusi yang lebih baik memiliki profit, ukuran yang lebih besar, resiko total dan sistematik yang lebih kecil dan PER yang lebih besar |
| Shane dan Spicer (1983) | 72 perusahaan | CEP Polution report | Harga saham | Perusahaan dengan rangking yang rendah memiliki return yang rendah |

Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Dalam tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan. Dampak positif ini berupa naiknya harga saham, naiknya profit perusahaan dan naiknya return saham perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata *stakeholder* memberikan apresiasi positif bagi perusahaan yang melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Pentingnya informasi yang terkandung dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial mengindikasikan bahwa pengungkapan atas pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan oleh pengguna informasi untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu informasi yang terkandung dalam pengungkapan tanggung jawab sosial ini harus mencermin keadaan sesungguhnya supaya tidak membuat pengguna informasi menjadi salah keputusan. Untuk menjamin bahwa pengungkapan atas tanggung jawab sosial telah disajikan dengan semestinya maka diperlukan audit atas pengungkapan tanggung jawab sosial ini.

## AUDIT ATAS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

Audit pertanggungjawaban sosial merupakan suatu proses dimana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban sosial mengukur dampak sosial dan perilaku relasi perusahaan.

Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektifitas program perusahaan yang bersifat sosial dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Suatu informasi internal dan eksternal memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber sumber daya dan dampaknya (baik sosial maupun ekonomi), oleh karena itu pada prinsipnya audit pertanggungjawaban sosial timbul dalam upaya memenuhi ketentuan informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Ide dasar audit sosial adalah keinginan untuk membuat bisnis semakin bertanggung jawab kepada masyarakat dan untuk meyakinkan bahwa dampak penting dan tidak penting dari suatu bisnis dapat dipahami. Beberapa literatur membuat definisi tentang audit pertanggungjawaban sosial seperti pada Tabel 5.

Dari beberapa definisi tentang audit sosial diatas sebenarnya audit pertanggungjawaban sosial didefinisikan menjadi dua hal besar. Yang pertama audit pertanggungjawaban sosial disamakan dengan akuntansi pertanggung jawaban sosial. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Gray et al. (1997) dan Day et al. (1995) bahwa audit pertanggungjawaban sosial kadangkala disamakan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Sedangkan yang kedua, audit pertanggungjawaban sosial diartikan sebagai

suatu proses pembuktian kewajaran atas akuntansi pertanggungjawaban sosial. Dalam makalah ini audit pertanggungjawaban sosial diartikan sebagai pembuktian kewajaran atas akuntansi pertanggungjawaban sosial.

Audit pertanggungjawaban sosial telah berkembang karena sudah merupakan suatu kebutuhan bagi *stakeholder*. Audit pertanggungjawaban sosial telah dilakukan di berbagai negara contohnya adalah Kanada, Australia, Amerika dan Inggris. Di Kanada, audit atas pertanggungjawaban sosial perusahaan telah dilakukan oleh *The Investment Committee of The United Church of Canada* tahun 1974. Dari hasil audit ini ditemukan bahwa audit pertanggungjawaban sosial bermanfaat untuk memberikan ukuran yang lebih akurat untuk kinerja non-eksekutif, memprediksi kinerja sosial di masa mendatang, melakukan perbandingan antar perusahaan, intra perusahaan dan inter industri.

**Tabel 5. Definisi Audit Pertanggungjawaban Sosial**

| Pendefinisi | Definisi |
|---|---|
| Buchholz (1982) | Usaha untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi dan melaporkan dan mengevaluasi dampak perusahaan pada masyarakat yang tidak ditemukan dalam akuntansi tradisional |
| Murphy and Burton (1980) | Suatu teknik pendokumentasian aktivitas perusahaan yang memperhatikan beberapa isu seperti mempekerjakan perempuan atau minoritas, donasi perusahaan dan lain sebagainya |
| Cotton et al (1998) | Proses dimana perusahaan menetapkan dan melaporkan kinerja sosialnya |
| Vinten (1990) | Review untuk memastikan bahwa perusahaaan memberikan perhatian yang luas untuk tanggungjawab sosial mereka |
| Turnbull (1995) | Proses dimana perusahaan mengukur dan melaporkan kinerja mereka dengan tujuan untuk menunjukkan tujuan sosial, komunitas dan lingkungan |
| John Humble (dalam Suyatmin dan Nursiam, 2003) | Pemeriksaan sistematis dan secara keseluruhan kebijakan dan praktek yang berlaku mengenai tanggung jawab sosial didalam dan diluar perusahaan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dan operasional |
| Zhang, Frasher and Hill | Proses untuk membuktikan bahwa data akuntansi telah disajikan dengan benar berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan akuntansi yang dimaksud disini adalah tentang akuntansi tanggung jawab sosial. |

Sumber: Diolah dari beberapa sumber

Dalam riset Brooks terhadap *Southam Press*, menemukan bahwa audit sosial akan dapat memberikan dampak bagi perusahaan dan anak perusahaan dalam hal: Perlindungan lingkungan, Hubungan industrial dan perlakuan kelompok minoritas, Konversi, Kontribusi komunitas dan Pengembangan dunia kerja.

Di Inggris, Australia dan Amerika *The Interest Research Council* melakukan riset secara mendasar terhadap dampak lingkungan, menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan Australia memiliki tingkatan yang paling kecil dibandingkan dengan Amerika dan Inggris, dimana Inggris lebih terdorong oleh adanya peruaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, adanya kesamaan prioritas atas jenis informasi, yakni SDM, masyarakat dan lingkungan di Australia, Amerika dan Inggris serta adanya perbedaan tingkat dan jenis kuantifikasi pengungkapan sosial ditiga negara tersebut.

Pentingnya audit pertanggungjawaban sosial seharusnya membuat perusahaan-perusahaan berusaha untuk melakukan audit atas akuntansi pertanggungjawaban sosial mereka. Tetapi dalam pelaksanaan audit pertanggungjawaban sosial terdapat beberapa hambatan. Dalam tabel 5 dibawah ini disajikan keuntungan dan hambatan dalam pelaksanaan audit pertanggungjawaban sosial.

**Tabel 6. Keuntungan dan Hambatan Audit Pertanggungjawaban Sosial**

| Keuntungan | *Hambatan* |
|---|---|
| Melibatkan *stakeholder* dalam organisasi | Dibutuhkan waktu dan usaha dari organisasi |
| Meningkatkan tanggung jawab kepada *stakeholder* utama | Biaya untuk mendanai sumber dari luar |
| Memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan | Belum ada standar yang mengatur audit pertanggungjawaban sosial |
| Menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial | Harus memperoleh opini dari nonstakeholder yang mungkin calon stakeholder potensial |
| Pengukuran untuk beberapa perluasan, mengamati dampak sosial organisasi. | Proses audit pertanggungjawaban sosial merupakan proses yang complicated dan membingungkan |
| Menstimulus timbulnya praktek yang jujur | Tidak ada standar kualifikasi untuk auditor pertanggungjawaban sosial |

Berkembangnya akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai wujud tanggung jawab

perusahaan kepada masyarakat dan salah satu alat untuk menilai kinerja perusahaan tidak diimbangi dengan adanya standar akuntansi yang mengatur akuntansi pertanggungjawaban sosial ini. Jika akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat diukur secara moneter maka audit dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang telah ada. Tetapi untuk akuntansi pertanggung-jawaban sosial yang tidak dapat diukur secara moneter atu pernyataannya secara diskriptif maka sulit untuk melakukan audit karena belum adanya standar yang kusus mengatur. Oleh merupakan suatu proses yang rumit dalam melakukan audit atas akuntansi pertanggung-jawaban sosial ini sebab audit pertanggung jawaban sosial merupakan suatu penilaian kewajaran atas akuntansi pertanggungjawaban sosial terhadap prinsip akuntansi berterima umum. Salah satu prinsip akuntansi berterima umum yang sering dijadikan panduan dalam proses audit adalah standar akuntansi keuangan. Belum adanya standar akuntansi tentang pertanggungjawaban sosial menyebabkan sulitnya proses audit itu sendiri.

Sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, maka ketika standar belum mengatur praktek yang terjadi dalam masyarakat maka dilihat dari level diatasnya. Level paling atas dari 'rumah prinsip akuntansi berterima umum (*house of GAAP*)' adalah praktek dalam masyarakat.

**Tabel 7. Perbandingan Model Audit Pertanggungjawaban Sosial**

| Model | Judul Laporan | Pendekatan | Fokus | Peran Stakeholder | Proses Audit Pertanggungjawaban Sosial |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechwood | Social Audit Report | Theme Approach | Landasan konstitusi dang Manage change Viability | Perwakilan stakeholder dalam tim audit | Persiapan manajemen<br>• Mendifinisikan lingkungan audit<br>• Melaksanakan audit sosial<br>• Moritoring dan pengukuran |
| Body Shop | Social Statement | Stakeholder Approach | Hubungan Stakeholder Accountability dan Transparency | Focus group Diikuti dengan kuisioner | Mereview atau adopsi kebijakan<br>• Mendifinisikan lingkungan audit<br>• Persetujuan indikator<br>• Konsultasi stakeholder dan survey<br>• Audit internal<br>• Persiapan rekening dan laporan internal<br>• Persetujuan tujuan<br>• Verifikasi External<br>• Publikasi Laporan dan follow up melalui dialog dengan stakeholder |
| Traidcraft | Social Audit Report Social Accounts | Stakeholder Approach | Accountability; Evaluasi Stakeholders atas kinerja perusahaan | Interview terhadap satkeholder dan kuisioner. | Identifikasi tujuan dan nilai<br>• Definisi stakeholder<br>• Seting indikator kinerja<br>• Kinerja akuntinsi dan pengukuran<br>• Verifikasi independen<br>• Laporan |
| LHTD | Social Audit Report | Theme Approach | Tujuan dan tindakan | Kuisioner dilanjutkan dengan fokus meeting | Pelatihan karyawan dan pencapaian kesadaran<br>• Mengembangkan sistem monitoring kinerja<br>• Survey<br>• Analisis data<br>• Membuat laporan audit sosial<br>• Verifikasi eksternal |
| Cooperative Bank | Partnership Report | Stakeholder (partnership) Approach | Accountability dan Responsibility | Partnership Ballot | Tim pengembangan atas dasar partnership<br>• Penetapan kinerja<br>• Menentukan prioritas area dan hubungan<br>• Persetujuan tujuan dan tanggungjawab<br>• Penetapan 3 area<br>• Membuat tujuan baru untuk laporan tahun<br>•Mendatang<br>•Verifikasi dan laporan. |
| APSO | Social Accounts | Mixed (first Theme then Stakeholder) And case study | Pandangan dan persepsi Stakeholders pada kualitas dan efektivitas jasa | Kuisioner dan interview | Tim akuntansi sosial<br>• Identifikasi stakeholder<br>• Memetakan stakeholder<br>• Membuat kuisioner<br>• Analisis kuisioner<br>• Verifikasi dan laporan |

Sumber: Zhang et al

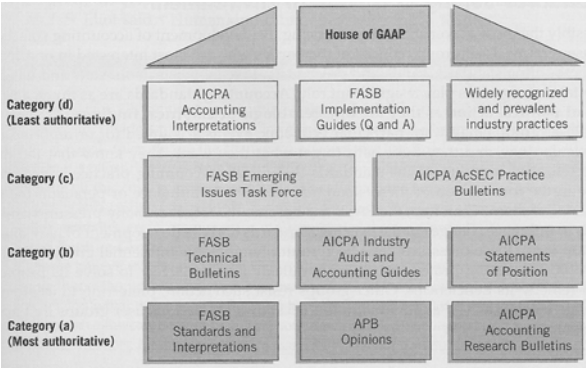


Sumber: Keiso et al (2004)

**Gambar 2. House of General Accepted Accounting Principle**

Berdasarkan *house of general accepted accounting principle* diatas dapat dilihat bahwa standar dan intrepretasi dari FASB (di Indonesia sama dengan IAI) menempati posisi yang paling mendasar (*most authoritative*). Jika ternyata standar belum mengatur maka level diatasnya dapat diguknakan sebagai dasar acuan. Dalam *house of general accepted accounting principle* diatas praktek yang terjadi pada industri berada pada posisi yang paling atas (*least authorritative*). Oleh sebab itu karena standar belum mengakut tanggung jawab sosial perusahaan maka sebagai acuan dapat dilihat pada praktek yang terjadi pad industri.

Praktek masyarakat tentang audit pertanggungjawaban sosial dalam masyarakat dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini yaitu pada Beechwood, Body Shop, Traidcraft, LHTD, Cooperative Bank, APSO.

Persamaan kelima model diatas adalah tahapan pelaksanaan audit pertanggungjawaban sosial adalah menjelaskan tujuan, mengidentifikasikan *stakeholder* dalam kepentingannya, memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan melihatnya sebagai pusat audit pertanggungjawaban sosial, melakukan verifikasi dari pihak internal dan eksternal yang independent, mengungkapkan penilaian kinerja kepada *stakeholder* dan publik, menilai kembali tujuan dan aktivitas perusahaan.

Berdasarkan praktek industri diatas dapat dilihat rangkaian kegiatan audit pertanggungjawaban sosial mulai dari penjelasan tujuan sampai dengan penilaian kembali tujuan perusahaan atas dasar hasil audit pertanggungjawaban sosial. Salah satu tahapan siklus diatas adalah melakukan verifikasi dari pihak internal dan eksternal yang independen. Perbedaan mendasar atas pelaksanaan audit atas akuntansi konvesional adalah pada mengidentifikasian kepentingan stakeholder. Dalam audit konvensional tidak ditemukan identifikasi kepentingan stakeholder sebab sudah ada standar tentang isi dan bagaimana pelaporannya dalam akuntansi konvensional.

Verifikasi atas laporan pertanggungjawab sosial ini merupakan inti pelaksanaan audit pertanggungjawaban sosial. Verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan menetapkan kewajaran atas asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan. Asersi manajemen terdiri dari asersi keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian atau alokasi serta asersi penyajian dan pengungkapan.

Dalam melihat kewajaran atas asersi-asersi diatas, untuk aspek dalam pertanggungjawaban sosial yang bisa diukur secara moneter kelima asersi diatas dapat digunakan. Sedangkan untuk aspek dalam pertanggungjawaban sosial yang tidak dapat diukur secara moneter asersi hak dan kewajiban serta asersi penilaian dan alokasi tidak dapat dilakukan sebab pengungkapan pertanggungjawaban sosial tidak dapat diukur dan tidak menunjukkan aktiva dan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Oleh sebab itu yang dapat dilakukan adalah asersi atas keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, serta asersi penyajian dan pengungkapan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

**Tabel 8. Asersi atas Pertanggungjawaban Sosial**

| | Moneter | Non Moneter |
|---|---|---|
| Asersi Keberadaan atau Keterjadian | ✓ | ✓ |
| Asersi Kelengkapan | ✓ | ✓ |
| Asersi Hak dan Kewajiban | ✓ | |
| Asersi Penilaian atau Alokasi | ✓ | |
| Asersi Penyajian dan Pengungkapan | ✓ | ✓ |

Asersi keberadaan atau keterjadian yang meyakinkan bahwa suatu peristiwa yang ada dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial memang benar-benar telah terjadi selama periode tertentu, sehingga walaupun dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial hanya mengungkapkan hal-hal yang bersifat non moneter dapat dilakukan verifikasi. Dalam asersi kelengkapan, laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial baik yang mengandung aspek moneter maupun non moneter dapat dilakukan verifikasi karena asersi ini berhubungan dengan apakah semua peristiwa yang terkait dengan pertanggungjawaban sosial telah disajikan dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Berbeda dengan asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi kelengkapan yang dapat diverifikasi baik yang mengandung aspek moneter

maupun non moneter, asersi hak dan kewajiban serta asersi penilaian atau alokasi hanya dapat dilakukan untuk laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang bersifat moneter sebab pengungkapan pertanggungjawaban sosial tidak dapat diukur dan tidak menunjukkan aktiva dan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Asersi yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan dapat dilakukan dalam laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial baik yang bersifat moneter maupun non moneter untuk memberikan keyakinan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan telah diklasifikasikan dengan benar.

## KESIMPULAN

Akuntansi pertanggungjawaban yang bersifat voluntary disclosure membutuhkan verifikasi pihak independen. Tetapi belum adanya standar yang mengatur akuntansi pertanggungjawaban sosial ini menyebabkan pelaksanaan audit pertanggungjawab sosial dilakukan berdasarkan praktik industri yang telah berlangsung.

Berdasarkan praktek industri maka tahapan audit sosial adalah menjelaskan tujuan, mengidentifikasikan *stakeholder* dalam kepentingannya, memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan melihatnya sebagai pusat audit pertanggungjawaban sosial, melakukan verifikasi dari pihak internal dan eksternal yang independent, mengungkapkan penilaian kinerja kepada *stakeholder* dan publik, menilai kembali tujuan dan aktivitas perusahaan.

Verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan menetapkan kewajaran atas asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan .Untuk aspek dalam pertanggungjawaban sosial yang bisa diukur secara moneter kelima asersi dapat digunakan. Sedangkan untuk aspek dalam pertanggungjawaban sosial yang tidak dapat diukur secara moneter yang dapat dilakukan adalah asersi atas keberadaan atau keterjadian, asersi kelengkapan, serta asersi penyajian dan pengungkapan.

## DAFTAR PUSTAKA


Accounting Standards Steering Committee (1975) *The Corporate Report*, ICAEW, London.

Belkauli, A. (1976) The Impact of The Disclosure of The Environment Effect of Organitational Behaviour on The Market, *Financial Management*.

Buchholz, R. (1982) *Business Environment and Public Policy*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Clarkson Max and Deck Michele (1992) *Applying the Stakeholder Management Model to The Analyse and Evaluation of Corporate Codes,* The Centre for Corporate Social Performance & Ethics, University of Toronto.

Cotton, P., I.A.M. Fraser dan W.Y. Hill (1998) *The Social Audit Agenda - Primary health Care in a Stakeholder Society*, Faculty of Business, Glasgow Caledonian University.

Gray, R., C. Dey, D. Owen, R. Evans and S. Zadek (1997) "Struggling with the praxis of social accounting: stakeholders, accountability, audits and procedures", *Accounting, Auditing and Accountability Journal.*

Gray, R., Owen, D. dan Maunders, K. (1987) *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Prentice Hall, London.

Jackman, C. J. (1982) *An Accountant's view of Social Accounting and Social Disclosure*, Institute of chartered Accountants Profesional development Course on Social Accounting and Social Disclosure.

Kieso Donald, E., Weygandt Jerry J., Warfield Terry, D. (2004) *Intermediate Accounting 11st*, John Willey & Sons, United Stated of America.

Mathew M.R. dan Perera M.H.B. (1993) *Accounting Theory and Development*, Thomas Nelson, Australia.

Murphy, P.E. and Burton, E.J. (1980) *Accountants assess the social audit*, Business.

Shane, P.B. dan Spincer, B.H. (1983) *Market Response to environmental Information Produce Outside the Firm*, Accounting Review.

Spincer, B.H. (1978) *Accounting for Corporate Social performance: Some Problem and Issues*, Journal of Contemporary Bussiness,

Suyatmin dan Nursiam (2003) *Audit Tanggungjawab Sosial bagi suatu Perusahaan*, Jurnal akuntansi dan Keuangan.

Turnbull, S. (1995) *The need for stakeholder councils in social audit*, Social and Environmental Accounting.

UEC Working Party on Social Reporting (1983) *Socio-economics information*, a report prepared for 9th UEC Congres, Strasburg.

Vinten, G. (1990) "*The social auditor*", International Journal of Value-Based Management.

Zhang, I., Fraser, dan Hill W.Y., *A Comparative Study of Social Audit Models and Reports*, Glasgow Caledonian University, UK.